

PERAN GLOBAL GOVERNANCE DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

Paper Tugas Mata Kuliah Organisasi Internasional dan Globalisasi



Disusun oleh:

Nyimas Arum Bela Suhardi (2316041040)

Alifia Fitri Rusinanto (2316041053)

Syakira Rahma ELWilda KS (2316041056)

Theresha Auzie Tuapattinaya (2316041071)

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

Globalisasi telah meningkatkan keterkaitan antarnegara dan memunculkan berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, ketimpangan ekonomi, dan konflik lintas negara. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara individual, melainkan membutuhkan kerja sama internasional yang terstruktur. Oleh karena itu, konsep global governance menjadi penting sebagai mekanisme pengaturan dan koordinasi antaraktor global. Paper ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana global governance berperan dalam menghadapi tantangan global serta mengidentifikasi berbagai keterbatasannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa global governance berperan penting dalam memfasilitasi kerja sama internasional, namun masih menghadapi kendala seperti kedaulatan negara, ketimpangan kekuasaan, dan lemahnya mekanisme penegakan. Studi kasus pada pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan krisis ekonomi global 2008 memperkuat argumen bahwa efektivitas global governance sangat bergantung pada komitmen negara dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: global governance, globalisasi, organisasi internasional, tantangan global, kerja sama internasional.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan salah satu fenomena terbesar yang membentuk tatanan dunia abad ke-21. Perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi yang pesat telah membuat interaksi antarnegara menjadi semakin intens dan saling bergantung satu sama lain. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi, transfer pengetahuan, dan kerja sama lintas batas. Namun di sisi lain, globalisasi juga melahirkan berbagai tantangan global (global challenges) yang kompleks dan lintas batas negara, seperti perubahan iklim, pandemi penyakit, terorisme internasional, hingga ketimpangan ekonomi yang semakin menganga.

Tantangan-tantangan ini memiliki satu kesamaan mendasar: tidak satu negara pun mampu mengatasinya secara sendirian. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada awal 2020, misalnya, menjadi jelas bahwa respons unilateral dari masing-masing negara tidak cukup untuk membendung penyebaran virus yang tidak mengenal batas negara. Begitu pula dengan perubahan iklim — emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh satu negara akan berdampak pada keseluruhan ekosistem bumi, tidak terkecuali negara yang bahkan hampir tidak berkontribusi terhadap emisi global.

Dalam konteks inilah konsep global governance hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan koordinasi internasional yang lebih terstruktur. Berbeda dengan pemerintahan nasional yang memiliki otoritas tunggal dan mekanisme penegakan yang jelas, global governance bersifat desentralisasi dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari negara, organisasi internasional, sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Konsep ini menawarkan kerangka kerja untuk mengelola masalah bersama tanpa harus mendirikan "pemerintahan dunia" yang tunggal — sebuah ide yang secara politis masih sangat sulit diterima oleh kebanyakan negara berdaulat.

Meskipun demikian, efektivitas global governance dalam praktiknya sering kali dipertanyakan. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang cukup besar antara komitmen yang disepakati di forum global dan implementasi nyata di tingkat nasional.

Hal ini mendorong perlunya analisis yang lebih kritis terhadap peran, kekuatan, sekaligus keterbatasan global governance dalam menghadapi tantangan global kontemporer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, paper ini merumuskan tiga pertanyaan utama yang akan dijawab dalam pembahasan:

- Apa yang dimaksud dengan global governance dan bagaimana konsep tersebut berkembang dalam hubungan internasional?
- Bagaimana peran global governance dalam menghadapi berbagai tantangan global?
- Apa saja kendala dan keterbatasan yang dihadapi dalam implementasi global governance?

1.3 Tujuan Penulisan

Paper ini ditulis dengan tujuan untuk:

- Menjelaskan konsep dan karakteristik global governance secara komprehensif;
- Menganalisis peran global governance dalam menghadapi tantangan global melalui studi kasus;
- Mengidentifikasi dan mendiskusikan keterbatasan global governance secara kritis.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan paper ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data yang digunakan mencakup buku teks, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan artikel akademik yang relevan dengan topik global governance dan tantangan global. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan teoritis serta studi kasus yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Global Governance

Konsep global governance muncul dan berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas hubungan internasional di era globalisasi. Untuk memahami konsep ini, penting terlebih dahulu membedakannya dari konsep "pemerintahan" (government) dalam arti tradisional. Pemerintahan nasional memiliki otoritas formal, struktur hierarkis, dan mekanisme penegakan yang jelas — misalnya polisi dan pengadilan yang dapat memaksa warga negara untuk mematuhi hukum. Global governance, sebaliknya, lebih bersifat desentralisasi, tidak memiliki otoritas tunggal yang berdaulat, dan sangat bergantung pada kerja sama sukarela dari berbagai aktor.

Rosenau (1995) mendefinisikan global governance sebagai sistem aturan dan mekanisme yang mengatur aktivitas global tanpa adanya otoritas tunggal yang berdaulat. Definisi ini menekankan bahwa pengelolaan isu global tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil. Dalam pengertian ini, global governance lebih tepat dipahami sebagai sebuah proses daripada sebuah struktur yang sudah jadi.

Weiss (2013) menambahkan dimensi kolektif dalam konsep ini dengan mendefinisikan global governance sebagai upaya kolektif untuk mengatasi masalah bersama melalui kerja sama internasional. Hal ini menunjukkan bahwa global governance pada dasarnya adalah sebuah proyek bersama yang membutuhkan kontribusi dari semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, global governance mencakup berbagai bentuk instrumen, mulai dari perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (hard law) hingga norma, prinsip, dan kesepakatan tidak tertulis (soft law).

Perspektif lain ditawarkan oleh Held dan McGrew (2007), yang melihat global governance sebagai bagian dari transformasi politik global yang lebih besar. Dalam pandangan ini, kekuasaan tidak lagi terpusat pada negara semata, melainkan tersebar di berbagai level — lokal, nasional, regional, dan global. Dengan demikian, global governance

dapat dipahami sebagai jaringan yang kompleks dan berlapis yang menghubungkan berbagai aktor dalam mengelola isu-isu global secara bersamaan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa global governance adalah sistem tata kelola yang bersifat multilateral, inklusif, dan berbasis kerja sama, yang bertujuan untuk mengelola tantangan-tantangan yang melampaui kapasitas satu negara secara individual.

2.2 Karakteristik Global Governance

Untuk lebih memahami global governance, penting untuk mengenali karakteristik-karakteristik utamanya. Global governance setidaknya memiliki lima karakteristik pokok yang membedakannya dari sistem pemerintahan tradisional, yaitu:

- Tidak memiliki otoritas pusat: Tidak ada "pemerintah dunia" yang memiliki kekuasaan mutlak. Keputusan diambil melalui negosiasi, konsensus, dan kompromi antaraktor yang memiliki kepentingan berbeda-beda.
- Melibatkan banyak aktor (multi-actor): Selain negara sebagai aktor utama, terdapat organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional, akademisi, dan masyarakat sipil yang berperan aktif dalam proses governance.
- Bersifat multilevel: Global governance tidak berlangsung hanya di satu tingkat. Proses ini mencakup interaksi di berbagai level, mulai dari komunitas lokal hingga forum global.
- Mengandalkan kerja sama sukarela (cooperation-based): Tidak seperti pemerintahan nasional yang dapat memaksakan aturan, global governance sangat bergantung pada kesediaan aktor untuk bekerja sama secara sukarela.
- Menggunakan berbagai instrumen: Instrumen yang digunakan meliputi hukum internasional, norma, kebijakan, mekanisme informal, insentif ekonomi, dan tekanan sosial.

Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bahwa global governance lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan sistem pemerintahan konvensional. Namun, fleksibilitas ini juga menjadi sumber kelemahan, karena global governance lebih rentan terhadap konflik kepentingan dan kurangnya komitmen dari para aktor yang terlibat.

2.3 Tantangan Global Kontemporer

Tantangan global merupakan isu-isu yang memiliki dampak luas dan melintasi batas negara, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Kaul et al. (1999) mengaitkan banyak tantangan global dengan konsep global public goods, yaitu kondisi atau barang yang manfaatnya dirasakan secara global dan tidak dapat dibatasi hanya pada satu negara tertentu — seperti iklim yang stabil, kesehatan masyarakat global, dan keamanan internasional.

Setidaknya terdapat lima kategori tantangan global utama yang relevan dalam konteks paper ini. Pertama, perubahan iklim, yang merupakan salah satu tantangan terbesar abad ini. Dampaknya yang meliputi kenaikan suhu global, bencana alam yang semakin ekstrem, dan kerusakan ekosistem bersifat lintas batas dan membutuhkan kerja sama internasional yang intens, karena emisi gas rumah kaca dari satu negara dapat memengaruhi seluruh planet.

Kedua, pandemi global. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana penyakit menular dapat menyebar dengan sangat cepat akibat mobilitas global yang tinggi. Penanganannya memerlukan koordinasi antarnegara dalam hal kebijakan kesehatan, distribusi vaksin, pertukaran data, dan penelitian bersama.

Ketiga, ketimpangan ekonomi global. Globalisasi tidak selalu membawa manfaat yang merata. Banyak negara berkembang masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang signifikan dibandingkan negara maju, baik dalam hal akses teknologi, pasar, maupun investasi.

Keempat, keamanan internasional. Ancaman seperti terorisme lintas negara, konflik bersenjata, perdagangan manusia, dan kejahatan siber menjadi tantangan yang memerlukan kerja sama global yang serius dan berkelanjutan.

Kelima, degradasi lingkungan. Selain perubahan iklim, isu seperti deforestasi, polusi laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati juga menjadi perhatian global yang mendesak.

2.4 Aktor dalam Global Governance

Salah satu ciri khas global governance adalah keterlibatan berbagai aktor yang beragam. Secara garis besar, aktor-aktor dalam global governance dapat dibagi menjadi empat kategori utama.

Pertama, negara (state actors). Meskipun bukan satu-satunya aktor, negara tetap menjadi aktor paling dominan dalam sistem internasional. Negara memiliki kedaulatan, sumber daya, dan kapasitas untuk membuat kebijakan serta menandatangani perjanjian internasional yang mengikat.

Kedua, organisasi internasional. Lembaga-lembaga seperti PBB, WHO, WTO, IMF, dan Bank Dunia berfungsi sebagai fasilitator kerja sama antarnegara. Mereka membantu dalam penyusunan norma dan kebijakan global, koordinasi tindakan kolektif, serta penyelesaian sengketa antarnegara.

Ketiga, aktor non-negara (non-state actors). Aktor non-negara memainkan peran yang semakin penting. LSM mengadvokasi isu-isu global seperti lingkungan dan hak asasi manusia; perusahaan multinasional memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global; sementara masyarakat sipil berperan dalam meningkatkan kesadaran publik dan mendorong akuntabilitas.

Keempat, jaringan transnasional (transnational networks). Jaringan ini menghubungkan aktor dari berbagai negara untuk bekerja sama dalam isu tertentu, seperti advokasi perubahan iklim atau perlindungan hak asasi manusia. Keberagaman aktor ini menunjukkan bahwa global governance bersifat inklusif secara prinsip, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal koordinasi dan pengambilan keputusan.

2.5 Pendekatan Teoritis dalam Global Governance

Terdapat beberapa pendekatan teoritis yang sering digunakan untuk memahami dinamika global governance. Masing-masing pendekatan ini menawarkan perspektif yang berbeda dan saling melengkapi.

Liberalisme Institusional menekankan pentingnya institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara. Institusi dianggap mampu mengurangi ketidakpastian, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan kepercayaan antarnegara. Dari perspektif ini, semakin kuat institusi internasional, semakin efektif global governance yang dapat dihasilkan.

Realisme, sebaliknya, memandang bahwa negara tetap menjadi aktor utama dan cenderung mengejar kepentingan nasionalnya sendiri. Dalam perspektif realisme, global governance sering kali merupakan cerminan dari distribusi kekuatan di antara negara-negara

besar. Artinya, negara-negara yang lebih kuat memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam membentuk agenda dan keputusan global.

Konstruktivisme menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menekankan peran norma, nilai, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor internasional. Dari perspektif ini, global governance dipandang sebagai hasil konstruksi sosial — sistem kepercayaan dan nilai bersama yang dibentuk secara kolektif oleh komunitas internasional.

Teori Kritis mempertanyakan netralitas global governance dan melihat sistem ini sebagai sesuatu yang dapat memperkuat ketimpangan global, terutama antara negara maju dan berkembang. Pendekatan ini mendorong pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh tata kelola global yang ada.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Peran Global Governance dalam Menghadapi Tantangan Global

Global governance berperan sebagai mekanisme koordinasi yang sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan global yang tidak dapat diselesaikan oleh negara secara individual. Secara umum, peran global governance dapat dikelompokkan ke dalam tiga fungsi utama: (1) memfasilitasi kerja sama internasional, (2) menciptakan norma dan aturan global yang menjadi acuan bersama, dan (3) mengoordinasikan respons kolektif terhadap krisis global.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas global governance sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik global dan kepentingan nasional masing-masing negara. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara komitmen yang disepakati di forum global dan implementasi nyata di tingkat nasional. Untuk memahami bagaimana global governance bekerja dalam konteks nyata, berikut akan dibahas tiga studi kasus yang relevan.

3.2 Studi Kasus: Penanganan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 menjadi salah satu ujian terbesar bagi sistem global governance dalam sejarah modern. Dalam situasi krisis ini, berbagai aktor global — mulai dari organisasi kesehatan internasional, pemerintah nasional, hingga sektor swasta — bergerak bersama untuk merespons pandemi.

Peran global governance dalam penanganan pandemi COVID-19 mencakup beberapa aspek penting. Pertama, dalam hal penyebaran informasi: lembaga-lembaga internasional memainkan peran krusial dalam mengumpulkan dan mendistribusikan data terkait penyebaran virus, varian baru, dan protokol kesehatan kepada seluruh negara anggota. Kedua, dalam hal koordinasi kebijakan kesehatan: forum internasional menjadi ruang negosiasi untuk menyepakati standar dan rekomendasi kesehatan global. Ketiga, dalam hal

distribusi vaksin secara global melalui mekanisme yang dirancang untuk memberikan akses kepada negara-negara yang tidak mampu membeli vaksin sendiri.

Meski demikian, pandemi COVID-19 juga mengekspos keterbatasan serius dalam sistem global governance. Fenomena vaccine nationalism (nasionalisme vaksin) menjadi salah satu masalah paling menonjol: negara-negara maju cenderung mengamankan stok vaksin jauh melebihi kebutuhan domestik mereka, sementara negara-negara berkembang berjuang untuk mendapatkan akses yang memadai. Akibatnya, distribusi vaksin secara global menjadi sangat tidak merata — sebuah realitas yang bertentangan dengan prinsip solidaritas dan keadilan global yang seharusnya menjadi landasan global governance.

Selain itu, koordinasi antarnegara dalam merespons pandemi juga sering kali tidak sinkron. Kebijakan pembatasan perjalanan, protokol karantina, dan strategi penanganan yang berbeda-beda antarnegara justru mengurangi efektivitas respons global secara keseluruhan. Dari kasus ini, terlihat bahwa global governance memiliki peran yang penting dan tak tergantikan, tetapi masih menghadapi kendala yang serius dalam hal solidaritas global dan distribusi yang adil.

3.3 Studi Kasus: Perubahan Iklim dan Kesepakatan Global

Isu perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global jangka panjang yang paling mendesak dan membutuhkan kerja sama internasional yang konsisten dan berkelanjutan. Global governance dalam isu ini diwujudkan melalui serangkaian perjanjian dan forum internasional, seperti Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Protokol Kyoto, hingga Perjanjian Paris.

Peran global governance dalam isu perubahan iklim meliputi penetapan target pengurangan emisi gas rumah kaca yang disepakati bersama, penyusunan kerangka kebijakan lingkungan global sebagai panduan bagi kebijakan nasional, serta pengawasan dan evaluasi terhadap komitmen yang telah dibuat oleh masing-masing negara.

Namun, sejumlah kritik perlu dikemukakan terhadap efektivitas global governance dalam isu ini. Kritik pertama berkaitan dengan sifat komitmen yang tidak mengikat kuat. Banyak kesepakatan internasional mengenai perubahan iklim bersifat soft law, sehingga tidak memiliki sanksi yang tegas bagi negara yang tidak memenuhi komitmennya. Tanpa mekanisme penegakan yang kuat, kepatuhan negara sangat bergantung pada kemauan politik masing-masing pemerintah.

Kritik kedua menyangkut ketimpangan tanggung jawab. Negara-negara berkembang sering kali merasa dibebani oleh kewajiban pengurangan emisi yang dianggap tidak proporsional, mengingat kontribusi historis mereka terhadap akumulasi emisi global jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara maju yang telah memulai industrialisasi lebih dahulu. Debat mengenai "tanggung jawab yang berbeda-beda namun bersifat bersama" (common but differentiated responsibilities) ini terus menjadi sumber ketegangan dalam negosiasi iklim global.

Kritik ketiga berkaitan dengan prioritas kepentingan ekonomi di atas komitmen lingkungan. Beberapa negara lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan komitmen lingkungan jangka panjang, sehingga menghambat implementasi kebijakan iklim global secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun global governance telah berhasil menciptakan kerangka kerja sama, implementasinya masih jauh dari ideal.

3.4 Studi Kasus: Krisis Ekonomi Global 2008

Krisis keuangan global tahun 2008 memberikan pelajaran penting tentang bagaimana global governance bekerja dalam situasi krisis ekonomi yang mengancam stabilitas sistem keuangan internasional. Krisis yang bermula dari pasar hipotek subprime di Amerika Serikat ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, mengancam keruntuhan sistem perbankan dan ekonomi global.

Dalam krisis ini, lembaga-lembaga internasional dan negara-negara besar bekerja sama untuk mencegah keruntuhan total sistem ekonomi global. Peran global governance mencakup koordinasi kebijakan moneter dan fiskal antarnegara untuk menstabilkan pasar, pemberian bantuan keuangan kepada negara-negara yang paling terdampak, serta upaya reformasi sistem keuangan global agar lebih tangguh terhadap krisis di masa depan.

Meski respons global governance ini berhasil mencegah keruntuhan total sistem ekonomi dunia, terdapat sejumlah kritik yang perlu dicermati. Pertama, keputusan-keputusan penting lebih banyak ditentukan oleh negara-negara besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik, sehingga kepentingan negara-negara berkembang sering kali kurang terakomodasi. Kedua, meskipun krisis bermula di negara-negara maju, negara-negara berkembang justru mengalami dampak yang sangat besar — berupa penurunan ekspor, berkurangnya investasi asing, dan meningkatnya kemiskinan. Ketiga, meskipun krisis

berhasil diredam, perubahan mendasar dalam arsitektur sistem keuangan global tetap sangat terbatas, sehingga potensi terulangnya krisis serupa tidak dapat dikesampingkan.

3.5 Analisis Kritis terhadap Global Governance

Berdasarkan tiga studi kasus di atas, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan global governance secara lebih komprehensif.

Dari sisi kekuatan, global governance terbukti mampu memfasilitasi kerja sama lintas negara yang tidak mungkin terwujud tanpa adanya forum dan mekanisme yang terstruktur. Global governance juga menyediakan ruang dialog dan negosiasi yang memungkinkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda untuk mencari titik temu. Selain itu, dalam situasi krisis global, global governance mampu mengoordinasikan respons kolektif yang lebih terorganisir dibandingkan aksi unilateral masing-masing negara.

Dari sisi kelemahan, global governance tidak memiliki kekuatan penegakan (enforcement) yang memadai. Tanpa sanksi yang tegas, komitmen negara-negara sering kali bersifat selektif — mereka mematuhi aturan hanya ketika sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Selain itu, global governance sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara yang terlibat, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dinamika internal masing-masing negara. Global governance juga rentan terhadap dominasi negara-negara besar, yang memiliki kemampuan untuk membentuk agenda global sesuai kepentingan mereka. Bagi negara-negara berkembang, hal ini sering berarti mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam proses pengambilan keputusan global.

Bagi negara-negara berkembang khususnya, global governance sering kali menjadi "pedang bermata dua." Di satu sisi, global governance memberikan akses terhadap kerja sama internasional, bantuan, dan transfer teknologi yang sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain, negara-negara berkembang sering kali harus menerima kondisi dan kewajiban yang tidak selalu menguntungkan posisi mereka.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, global governance merupakan mekanisme yang sangat penting dalam menghadapi tantangan global di era globalisasi. Melalui kerja sama antarnegara dan berbagai aktor internasional, global governance mampu memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang melampaui kapasitas satu negara secara individual.

Kedua, ketiga studi kasus yang dibahas — pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan krisis ekonomi global 2008 — secara konsisten menunjukkan bahwa global governance dapat berfungsi sebagai koordinator respons kolektif yang efektif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen negara, distribusi kekuasaan global, dan kapasitas institusi internasional yang terlibat.

Ketiga, terdapat kesenjangan struktural yang signifikan dalam global governance: ketidakhadiran mekanisme penegakan yang kuat, dominasi negara-negara besar dalam proses pengambilan keputusan, dan kurangnya inklusivitas bagi negara-negara berkembang. Kesenjangan-kesenjangan ini membuat global governance belum sepenuhnya mampu mewujudkan prinsip keadilan dan solidaritas global yang menjadi fondasinya.

Dengan demikian, global governance perlu terus diperkuat dan direformasi agar mampu menjawab tantangan global secara lebih adil, efektif, dan inklusif — baik bagi negara maju maupun berkembang.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan. Pertama, diperlukan penguatan mekanisme penegakan dalam sistem global governance. Tanpa mekanisme yang memiliki kekuatan nyata, komitmen negara-negara akan selalu rentan terhadap pertimbangan kepentingan nasional jangka pendek.

Kedua, perlu dilakukan reformasi dalam representasi dan pengambilan keputusan di forum-forum global, sehingga negara-negara berkembang mendapatkan suara yang lebih

proporsional. Keputusan-keputusan global yang lebih inklusif akan menghasilkan komitmen yang lebih kuat dan implementasi yang lebih efektif.

Ketiga, global governance perlu mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul, seperti ancaman siber, kecerdasan buatan, dan krisis pangan global. Ini membutuhkan fleksibilitas kelembagaan yang lebih besar, sekaligus kemampuan untuk merespons dengan cepat ketika krisis terjadi.

Pada akhirnya, global governance bukanlah solusi ajaib yang dapat menyelesaikan semua masalah dunia — melainkan sebuah kerangka kerja yang terus berkembang, yang membutuhkan komitmen, itikad baik, dan partisipasi aktif dari seluruh komunitas internasional untuk bisa benar-benar efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Held, D., & McGrew, A. (2007). *Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great Divide* (2nd ed.). Polity Press.
- Kaul, I., Grunberg, I., & Stern, M. A. (Eds.). (1999). *Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century*. Oxford University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2000). Introduction. In J. S. Nye & J. D. Donahue (Eds.), *Governance in a Globalizing World* (pp. 1–44). Brookings Institution Press.
- Rosenau, J. N. (1995). Governance in the Twenty-first Century. *Global Governance*, 1(1), 13–43.
- Weiss, T. G. (2013). *Global Governance: Why? What? Whither?* Polity Press.
- Biermann, F., & Pattberg, P. (2012). *Global Environmental Governance Reconsidered*. MIT Press.
- Barnett, M., & Finnemore, M. (2004). *Rules for the World: International Organizations in Global Politics*. Cornell University Press.
- Risse, T. (2011). *Governance Without a State? Policies and Politics in Areas of Limited Statehood*. Columbia University Press.